

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Persediaan

Pada dasarnya persediaan ditujukan untuk barang- barang yang tersedia untuk dijual atau digunakan untuk menghasilkan barang yang akan dijual. Karakteristik dari barang yang diklasifikasikan sebagai persediaan yang bervariasi terhadap jenis kegiatan usaha. Dalam kasus perusahaan manufaktur, persediaan ditujukan untuk barang dalam proses produksi atau ditempatkan dalam kegiatan produksi. Bagi perusahaan, persediaan merupakan bagian yang paling efektif dalam operasi perusahaan, yang secara terus-menerus dibeli atau diproduksi dan dijual. Sebagian besar sumber daya perusahaan dapat diinvestasikan dalam barang yang dibeli atau diproduksi. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) No. 11 Tahun 2018, persediaan adalah aset :

- a. Untuk dijual dalam kegiatan usaha normal;
- b. Dalam proses produksi untuk kemudian dijual; atau
- c. Dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa.

Persediaan adalah “salah satu jenis aktiva lancar yang jumlahnya cukup besar dalam suatu perusahaan.” Sartono (2010: 443)

Menurut Effendi (2015: 217) Pengertian Persediaan adalah:

Istilah yang digunakan untuk menunjukkan barang-barang yang dimiliki oleh suatu perusahaan akan bergantung pada jenis usaha perusahaan. Istiah yang digunakan dapat dibedakan untuk usaha dagang yaitu perusahaan yang membeli dan menjualnya kembali tanpa mengadakan perubahan bentuk barang, dan perusahaan manufaktur yaitu perusahaan yang membeli bahan dan mengubah bentuknya untuk dapat dijual.

Berdasarkan pengertian persediaan menurut para ahli dan Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)) No. 11 Tahun 2018, terdapat perbedaan pengertian persediaan menurut perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Dalam perusahaan dagang, persediaan merupakan barang yang dibeli untuk dijual kembali ke konsumen tanpa mengubah bentuk dari barang tersebut. Dalam perusahaan

manufaktur, persediaan merupakan barang yang dibeli untuk diproses atau diproduksi sebelum di jual ke konsumen.

2.2 Kepemilikan Persediaan

Hak kepemilikan persediaan adalah untuk menentukan apakah barang itu sudah dicatat sebagai persediaan. Barang-barang akan dicatat sebagai persediaan pihak yang memiliki barang-barang tersebut, sehingga perubahan catatan persediaan akan didasarkan pada perpindahan hak pemilikan barang. Kadang-kadang terdapat keadaan dimana sulit untuk menentukan hak pemilikan barang sehingga dalam praktek akan ditemui adanya penyimpangan. Menurut Baridwan (2015: 152) mengemukakan bahwa kesulitan menentukan perpindahan hak atas barang antara lain timbul dalam keadaan berikut ini:

1. Barang-barang dalam perjalanan (*Goods in Transit*)

Barang-barang yang pada tanggal neraca masih dalam perjalanan menimbulkan masalah apakah masih milik penjual atau sudah berpindah haknya kepada pembeli. Untuk mengetahui barang-barang itu milik siapa, harus diketahui syarat pengiriman barang-barang tersebut. Ada dua syarat pengiriman yaitu :

- a. *FOB Shipping Point*, apabila barang-barang dikirim dengan syarat diatas, maka hak atas barang yang dikirim berpindah pada pembeli ketika barang-barang tersebut diserahkan pada pihak pengangkut. Pada saat tersebut penjual mencatat jurnal penjualan mengurangi persediaan barangnya, sedangkan pembeli mencatat pembelian dan menambah persediaan barangnya. Pembeli mencatat pembelian dan menambah persediaan barangnya pada waktu barang-barang tersebut diterima oleh pembeli, sedangkan penjual akan mencatat penjualan dan mengurangi persediaan barangnya pada waktu megirimkan barang-barang tersebut.
- b. *FOB Destination*, berarti bahwa hak atas barang baru berpindah pada pembeli jika barang-barang yang dikirim sudah diterima oleh pembeli. Jadi perpindahan hak atas barang terjadi pada tanggal penerimaan barang oleh pembeli. Pada saat tersebut penjual mengurangi persediaan barangnya dan mencatat penjualan, sedangkan pembeli mencatat pembelian dan menambah persediaan barangnya.

2. Barang-barang yang dipisahkan (*Segregated Goods*)

Kadang-kadang terjadi suatu kontak penjualan barang dalam jumlah besar sehingga pengirimannya tidak dapat dilakukan sekaligus. Barang-barang yang dipisahkan tersendiri dengan maksud untuk memenuhi kontrak-kontrak atau pesanan-pesanan walaupun belum dikirim, haknya sudah berpindah pada pembeli. Oleh karena itu, pada tanggal penyusunan laporan keuangan jika ada barang-barang yang dipisahkan, harus dikeluarkan dari jumlah persediaan penjual dan dicatat sebagai penjualan. Begitu pula pembeli dapat mencatat pembelian dan menambah persediaan barangnya.

3. Barang-barang Konsinyasi (*Consignment Goods*)

Dalam cara penjualan titipan, barang-barang yang dititipkan untuk dijual (dikonsinyasikan) haknya masih tetap pada yang menitipkan sampai saat barang-barang tersebut dijual. Sebelum barang-barang tersebut dijual masih tetap menjadi persediaan pihak yang menitipkan (*consignor*). Pihak yang menerima titipan (*consignee*) tidak mempunyai hak atas barang-barang tersebut sehingga tidak mencatat barang-barang tersebut sebagai persediaannya. Apabila barang-barang itu sudah dijual maka yang menerima titipan membuat laporan pada yang menitipkan. Pada waktu menerima laporan, pihak yang menitipkan (*consignor*) mencatat penjualan dan mengurangi persediaan barangnya.

4. Penjualan Angsuran (*Installment Goods*)

Dalam penjualan angsuran, hak atas barang tetap pada penjual sampai seluruh harga jualnya dilunasi. Penjual akan melaporkan barang-barang tersebut dalam persediaannya dikurangi dengan jumlah yang sudah dibayarkan. Apabila dianggap bahwa kemungkinan pembatalan penjualan tersebut adalah kecil maka penjual dapat mengakuinya sebagai penjualan biasa yang diangsur dan pembeli dapat mencatatnya sebagai pembelian biasa yang pembayarannya diangsur.

2.3 Biaya – biaya yang Harus Dimasukkan Dalam Persediaan

Biaya persediaan terdiri dari seluruh pengeluaran, baik yang langsung maupun tidak langsung, yang berhubungan dengan pembelian, persiapan, dan penempatan persediaan untuk dijual. Menurut Kieso, Weygandt dan Warfield (2017: 511), biaya-biaya yang harus dimasukkan dalam persediaan yaitu:

1. Biaya Produk

Biaya produk (*product costs*) adalah biaya yang “menempel” ke persediaan. Akibatnya perusahaan mencatat biaya produk dalam akun

persediaan. Biaya tersebut langsung berhubungan dengan membawa barang ke tempat bisnis pembeli dan mengonversi barang-barang tersebut menjadi kondisi yang dapat dijual. Biaya tersebut umumnya meliputi: (1) biaya pembelian, (2) biaya konversi, dan (3) "biaya lain" yang timbul dalam membawa persediaan ke titik penjualan dan dalam kondisi siap untuk dijual. Biaya pembelian meliputi harga pembelian, bea masuk dan harga lainnya, biaya transportasi, dan biaya penanganan langsung yang terkait dengan perolehan barang.

2. Biaya Periode

Biaya periode (*period costs*) adalah biaya-biaya yang tidak langsung berhubungan dengan perolehan atau produksi barang. Biaya periode seperti beban penjualan dan, beban umum dan administrasi, dalam kondisi normal, tidak dimasukkan sebagai bagian dari biaya persediaan.

3. Perlakuan Diskon Pembelian

Pemakaian akun diskon pembelian (*purchase discount*) dalam sistem persediaan periodik menunjukkan bahwa perusahaan melaporkan pembelian dan utang usaha pada jumlah kotor.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) No. 11 tahun 2018, "Biaya perolehan persediaan mencakup seluruh biaya pembelian, biaya konversi dan biaya lainnya yang terjadi untuk membawa persediaan ke kondisi dan lokasi sekarang".

2.4 Sistem Pencatatan Persediaan

Dalam melakukan pencatatan persediaan, perusahaan dapat menggunakan salah satu metode yang ada. Terdapat dua metode pencatatan persediaan menurut Mulyadi (2016: 265) yaitu:

1. Metode periodik/fisik adalah cocok digunakan dalam penentuan biaya bahan baku dalam perusahaan yang harga pokok produknya dikumpulkan dengan metode harga pokok proses.
2. Metode perpetual adalah cocok digunakan dalam penentuan biaya bahan baku dalam perusahaan yang harga pokok produknya dikumpulkan dengan metode harga pokok pesanan.

2.4.1 Sistem Pencatatan Perpetual

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2016: 198), sistem pencatatan perpetual merupakan sistem pencatatan seluruh kenaikan dan penurunan dalam

persediaan, dengan cara yang sama dengan pencatatan kenaikan dan penurunan dalam kas.

Sistem pencatatan persediaan perpetual menurut Kieso, dkk., (2018: 501), “Sistem persediaan perpetual (*perpetual inventory system*) terus melacak perubahan dalam akun persediaan.

Dalam sistem pencatatan perpetual menurut Sasongko, dkk., (2018:304):

1. Semua pembelian dan penjualan persediaan barang dagang langsung menambah dan mengurangi jumlah persediaan serta akan dicatat atau dibuatkan ayat jurnalnya.
2. Akun persediaan barang dagang pada awal periode akuntansi memperlihatkan jumlah persediaan yang sebenarnya karena diperoleh dari pemeriksaan persediaan (*stock opname*) periode sebelumnya.
3. Pembelian dicatat dengan mendebit akun persediaan barang dagang dan mengkredit akun kas atau utang usaha.
4. Pada saat penjualan barang dagang, beban pokok penjualan dicatat dengan medebit akun beban pokok penjualan dan mengkredit akun persediaan barang dagang.

Pencatatan transaksi persediaan dengan menggunakan sistem pencatatan perpetual akan mempengaruhi akun persediaan dan beban pokok penjualan. Transaksi-transaksi tersebut meliputi pembelian persediaan, diskon pembelian, retur pembelian, ongkos kirim, penjualan dan retur penjualan dari pelanggan. Berikut ini adalah ilustrasi yang menggambarkan pencatatan transaksi dagang dengan menggunakan sistem perpetual.

Tabel 2.1
Pencatatan Transaksi Dagang Menggunakan Sistem Perpetual

Transaksi	Sistem Persediaan Perpetual	
5 Juni. Membeli barang secara kredit senilai Rp30.000 dengan syarat 2/10, n/130.	Persediaan	30.000
	Utang Usaha	30.000
8 Juni. Mengembalikan barang yang dibeli secara kredit pada tanggal 5 Juni senilai Rp500.	Utang Usaha	30.000
	Persediaan	30.000
15 Juni. Membayar pembelian 5 Juni dikurangi retur Rp500 dan diskon Rp	Utang Usaha	29.500
	Kas	28.910

590 [(Rp30.000 – Rp500) x 2%].	Persediaan	590
18 Juni. Menjual barang secara kredit senilai Rp12.500, dengan syarat 1/10, n/30. Beban pokok penjualan sebesar Rp9000.	Piutang Usaha	12.500
	Penjualan	12.500
	Beban Pokok Penjualan	9.000
	Persediaan	9.000
21 Juni. Menerima retur barang yang terjual secara kredit sebesar Rp4.000. Harga pokok barang yang diretur adalah Rp2.800.	Retur & Pot. Penjualan	4.000
	Piutang Usaha	4.000
	Persediaan	2.800
	Beban Pokok Penjualan	2.800
22 Juni. Membeli barang senilai Rp15.000, dengan syarat FOB titik pengiriman, 2/15, n/30, dengan ongkos kirim dibayar dimuka sebesar Rp750, yang ditambahkan dalam nilai faktur.	Persediaan	15.750
	Utang Usaha	15.750
28 Juni. Menerima pembayaran atas penjualan secara kredit tanggal 18 Juni, sebesar Rp8.415, dikurangi retur tanggal 21 Juni dan diskon sebesar Rp85 [(Rp12.500 – Rp4000) x 1%].	Kas	8.415
	Diskon Penjualan	85
	Piutang Usaha	8.500
29 Juni. Menerima Rp19.600 dari penjualan tunai. Beban pokok penjualan sebesar Rp13.800	Kas	19.600
	Penjualan	19.600
	Beban Pokok Penjualan	13.800
	Persediaan	13.800

Sumber : Warren, dkk., (2014: 306-307)

Berdasarkan pada uraian para ahli diatas, pada sistem pencatatan perpetual dilakukan secara terus-menerus, sehingga harga pokok persediaan dan jumlah persediaan yang masih ada dapat diketahui setiap saat dan dapat memudahkan dalam penyusunan laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan.

2.4.2 Sistem Pencatatan Periodik

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2016: 202), sistem pencatatan periodik adalah pencatatan yang dilakukan hanya pada pendapatan setiap terjadi penjualan, sementara beban pokok penjualan tidak dicatat. Pada saat pembelian, dicatat sebagai pembelian dan bukan sebagai persediaan. Saldo akhir persediaan dan beban pokok penjualan bisa diketahui jika sudah dilakukan perhitungan fisik.

Menurut Sasongko, dkk., (2018: 320) Ketika sistem pencatatan periodik diterapkan :

1. Pada saat penjualan barang dagang hanya transaksi penjualannya saja yang dibuatkan ayat jurnalnya.
2. Tidak ada ayat jurnal yang dicatat untuk mengakui beban pokok penjualan setiap kali terjadi penjualan.
3. Pada akhir periode akuntansi, perhitungan fisik dilakukan untuk menentukan jumlah persediaan yang masih ada digudang barang dagang dan beban pokok penjualan untuk periode tersebut.

Pada metode ini tidak terdapat catatan mutasi persediaan barang, maka beban pokok penjualan tidak dapat diketahui. Beban pokok penjualan baru dapat dihitung setelah melakukan pemeriksaan fisik (*stock opname*) dan mengetahui jumlah persediaan akhir. Berikut ini adalah rumus yang dapat digunakan untuk menentukan beban pokok penjualan pada metode pencatatan persediaan secara periodik.

Tabel 2.2
Perhitungan Harga Pokok Penjualan

Persediaan Awal	Rpxxx
Pembelian (Neto)	Rpxxx
Tersedia untuk dijual	Rpxxx
Persediaan Barang Akhir	(Rpxxx)
Harga pokok penjualan	Rpxxx

Sumber: Effendi (2015: 218)

Pencatatan transaksi persediaan dengan menggunakan sistem pencatatan periodik tidak dicatat dalam akun persediaan, melainkan menggunakan akun pembelian, diskon pembelian serta retur dan potongan pembelian. Selain itu,

penjualan persediaan juga tidak mempengaruhi akun persediaan dan beban pokok penjualan. Berikut ini adalah ilustrasi yang menggambarkan pencatatan transaksi dagang dengan menggunakan sistem periodik.

Tabel 2.3
Pencatatan Transaksi Dagang Menggunakan Sistem Periodik

Transaksi	Sistem Persediaan Periodik	
5 Juni. Membeli barang secara kredit senilai Rp30.000 dengan syarat 2/10, n/130.	Pembelian	30.000
	Utang Usaha	30.000
8 Juni. Mengembalikan barang yang dibeli secara kredit pada tanggal 5 Juni senilai Rp500.	Utang Usaha	30.000
	Retur & Pot. Pembelian	30.000
15 Juni. Membayar pembelian 5 Juni dikurangi retur Rp500 dan diskon Rp 590 [(Rp30.000 – Rp500) x 2%].	Utang Usaha	29.500
	Kas	28.910
	Diskon Pembelian	590
18 Juni. Menjual barang secara kredit senilai Rp12.500, dengan syarat 1/10, n/30. Beban pokok penjualan sebesar Rp9000.	Piutang Usaha	12.500
	Penjualan	12.500
21 Juni. Menerima retur barang yang terjual secara kredit sebesar Rp4.000. Harga pokok barang yang diretur adalah Rp2.800.	Retur & Pot. Penjualan	4.000
	Piutang Usaha	4.000
22 Juni. Membeli barang senilai Rp15.000, dengan syarat FOB titik pengiriman, 2/15, n/30, dengan ongkos kirim dibayar dimuka sebesar Rp750, yang ditambahkan dalam nilai faktur.	Pembelian	15.000
	Ongkos Kirim Pembelian	750
	Utang Usaha	15.750

28 Juni. Menerima pembayaran atas penjualan secara kredit tanggal 18 Juni, sebesar Rp8.415, dikurangi retur tanggal 21 Juni dan diskon sebesar Rp85 [(Rp12.500 – Rp4000) x 1%].	Kas	8.415
	Diskon Penjualan	85
	Piutang Usaha	8.500
29 Juni. Menerima Rp19.600 dari penjualan tunai. Beban pokok penjualan sebesar Rp13.800	Kas	19.600
	Penjualan	19.600

Sumber : Warren, dkk., (2014: 306-307)

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sistem pencatatan periodik merupakan pencatatan persediaan yang tidak dilakukan terus-menerus namun dicatat setiap akhir periode dengan menghitung jumlah fisik persediaan yang ada, kemudian ditentukan harga pokok persediaan.

2.5 Sistem Penilaian Persediaan

Metode penilaian persediaan menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) No. 11 Tahun 2018 mengenai Persediaan, metode penilaian persediaan terdapat dua metode yaitu :

1. Metode MPKP / FIFO (Masuk Pertama Keluar Pertama / *First In First Out*)
2. Metode Rata – Rata Tertimbang (*Weighted Average*)

Menurut Kieso, Weygant dan Warfield, (2017: 515) terdapat tiga alternatif yang dapat dipertimbangkan oleh suatu entitas terkait dengan asumsi arus biaya, yaitu:

1. Identifikasi Khusus
Identifikasi khusus (*specific identification*) dibutuhkan untuk mengidentifikasi setiap item yang dijual dan setiap item yang masih dalam persediaan. Perusahaan memasukkan biaya dari barang tertentu yang terjual kedalam beban pokok penjualan. Perusahaan memasukkan biaya dari item tertentu yang masih ada kedalam persediaan.

2. Biaya Rata-rata

Metode biaya rata rata (*average cost method*) memberikan harga persediaan berdasarkan biaya rata rata semua barang serupa yang tersedia selama periode tersebut.

3. *First In, First out* (FIFO)

Metode FIFO (*first in, first out*) mengasumsikan bahwa perusahaan menggunakan barang dalam urutan pembeliannya. Dengan kata lain, metode FIFO mengasumsikan bahwa barang pertama yang dibeli adalah yang pertama digunakan (pada perusahaan manufaktur) atau yang pertama dijual (pada perusahaan dagang). Oleh karena itu, persediaan yang tersisa harus mencerminkan pembelian terbaru.

4. *Last In, First out* (LIFO)

Metode LIFO (*last in, first out*) menyesuaikan beban pokok yang terakhir dibeli terhadap pendapatan. Jika yang digunakan adalah persediaan periodik, maka akan diasumsikan bahwa biaya dari total kuantitas yang terjual atau dikeluarkan selama satu bulan berasal dari pembelian paling akhir.

Untuk menentukan beban pokok penjualan dari persediaan barang dagang, terdapat empat asumsi arus biaya yang dapat digunakan menurut Sasongko, dkk., (2018: 303), yaitu :

1. Metode Identifikasi Khusus (*Specific Identification Method*)

Metode Identifikasi khusus dapat digunakan untuk menentukan beban pokok penjualan jika perusahaan dapat menentukan dengan tepat dari transaksi pembelian. Metode ini sesuai untuk unit persediaan yang dapat dipisahkan untuk proyek tertentu atau unit persediaan yang tidak dapat ditukar dengan persediaan lain (*not-ordinary interchangeable*).

2. Metode *First In First Out* (FIFO)

Dengan metode FIFO, harga perolehan dari barang yang pertama kali dibeli akan menjadi beban pokok penjualan dari barang dagang yang dijual pertama kali pula.

3. Metode *Last In First Out* (LIFO)

Dengan metode LIFO, harga perolehan dari barang yang pertama kali dibeli akan menjadi beban pokok penjualan dari barang dagang yang dijual pertama kali

4. Metode Biaya Rata-rata

Dengan metode biaya rata-rata, beban pokok penjualan barang dagang yang dijual adalah rata-rata dari biaya:

- a. persediaan barang dagang awal; dan
- b. seluruh pembelian yang dilakukan pada suatu periode.

Penentuan harga pokok persediaan tergantung pada kebijakan manajemen dalam suatu perusahaan. Setiap metode biasanya menghasilkan jumlah harga

pokok penjualan dan persediaan akhir yang berbeda. Oleh karena itu, metode penentuan harga pokok persediaan yang digunakan secara langsung mempengaruhi laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan dalam suatu perusahaan. Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa metode pencatatan persediaan yang digunakan pada PSAK 14 menggunakan semua metode kecuali LIFO (*Last In, First Out*).

2.6 Penentuan Harga Pokok Persediaan dengan Metode Taksiran

Seperti telah dijelaskan diatas, dalam metode fisik perhitungan harga pokok persediaan dilakukan pada akhir periode, tapi bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadi kebakaran, pencurian, ataupun bencana alam yang mengakibatkan kerugian atau musnahnya persediaan yang ada digudang perusahaan, maka perusahaan memerlukan cara-cara taksiran untuk menaksir jumlah persediaan yang terbakar atau hilang tersebut. Menurut Zaki Baridwan (2015: 150), terdapat dua cara untuk menaksir jumlah persediaan yaitu:

1. Metode Laba Bruto

Dalam metode laba bruto, pertama kali harus ditentukan besarnya persentase laba bruto. Persentase ini bisa didasarkan pada penjualan atau harga pokok penjualan. Biasanya persentase laba bruto ditentukan dengan menggunakan data tahun-tahun lalu. Sesudah persentase laba bruto diketahui, kemudian dikalikan pada penjualan dan hasilnya dikurangkan pada penjualan sehingga dapat ditentukan jumlah harga pokok penjualan. Selisih antara harga pokok penjualan dengan barang-barang yang tersedia untuk dijual merupakan persediaan akhir. Dalam penggunaan laba bruto, untuk menentukan nilai persediaan barang pada akhir periode selain data yang diperoleh dari catatan mengenai persediaan diperlukan juga mengenai hasil penjualan bersih dan persentase laba kotor dari hasil penjualan neto.

2. Metode Harga Eceran

Metode harga eceran biasanya digunakan dalam toko-toko yang menjual bermacam-macam barang secara eceran, termasuk toko serba ada. Dalam perusahaan-perusahaan seperti itu biasanya digunakan metode fisik untuk pencatatan persediaan karena metode perpetual akan menimbulkan banyak pekerjaan. Metode eceran ini memungkinkan dihitugnya jumlah persediaan akhir tanpa mengadakan perhitungan fisik. Dalam penentuan metode harga eceran diperlukan data mengenai taksiran harga jual seluruh baran yang disediakan dalam suatu periode berdasarkan harga ecerannya dan jumlah yang telah terjadi selama periode bersangkutan.

Oleh karena itu, suatu perusahaan perlu mengetahui jumlah persediaan apabila sistem pencatatan persediaan perpetual tidak dilakukan dan tidak praktis pula untuk melakukan perhitungan fisik. Misalnya terjadi bencana seperti kebakaran yang menghancurkan persediaan, maka jumlah kerugian harus ditentukan. Sehingga diperlukan adanya estimasi biaya persediaan dengan menggunakan metode laba bruto atau metode harga eceran.

2.7 Perbandingan Metode Penilaian Persediaan MPKP, MTKP, dan Rata – rata Tertimbang

Setiap metode mengasumsikan arus biaya yang berbeda-beda. Apabila biaya unit tetap stabil, seluruh metode akan mendapatkan hasil yang sama. Akan tetapi, apabila harga berubah-ubah, tiga metode tersebut akan menghasilkan jumlah yang berbeda pada:

1. Beban Pokok Penjualan untuk periode berjalan
2. Persediaan Akhir
3. Laba Kotor (dan Laba Bersih) untuk periode tersebut

Pada Metode MPKP/FIFO akan menghasilkan jumlah beban pokok penjualan yang paling rendah dikarenakan beban pokok penjualan akan dihitung dari barang yang pertama kali dibeli. Selain itu, untuk laba kotor, laba bersih dan jumlah persediaan akhir metode persediaan MPKP/FIFO akan menghasilkan jumlah yang paling tinggi. Untuk metode MTKP/LIFO akan menghasilkan beban pokok penjualan yang paling tinggi dikarenakan beban pokok penjualan akan dihitung dari barang yang terakhir kali dibeli, serta menghasilkan jumlah yang paling rendah pada laba kotor, laba bersih dan persediaan akhir. Pada metode rata-rata menghasilkan jumlah diantara MPKP/FIFO dan MTKP/LIFO, namun sedikit mendekati metode MPKP/FIFO.

2.7.1 Perbandingan Metode Penilaian Persediaan MPKP, MTKP, dan Rata – rata Tertimbang dengan Sistem Pencatatan Perpetual

Pada metode MPKP/FIFO perhitungan beban pokok penjualan menggunakan biaya pembelian yang pertama terlebih dahulu. Persediaan akhir adalah sejumlah sisa persediaan yang masih ada dengan menggunakan biaya

pembelian yang terakhir. Berikut ilustrasi perhitungannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Perhitungan Penilaian Persediaan dengan Metode MPKP/FIFO dan
Sistem Pencatatan Perpetual

Tanggal		Pembelian			Beban Pokok Penjualan			Persediaan			
		Q	Biaya per Unit	Jumlah Biaya	Q	Biaya per Unit	Jumlah Biaya	Q	Biaya per Unit	Jumlah Biaya	
Mar	1							10	100.000	1.000.000	
	4				7	100.000	700.000	3	100.000	300.000	
	10	8	105.000	840.000				3	100.000	300.000	
								8	105.000	840.000	
	22				3	100.000			7	105.000	735.000
28				2	105.000	210.000	5	105.000	525.000		
30	10	110.000	1.100.000				5	105.000	525.000		
							10	110.000	1.100.000		

Sumber: Sasongko, dkk., (2018: 308)

Beban pokok penjualan dalam metode MTKP/LIFO dihitung menggunakan biaya pembelian terakhir dan persediaan akhir dihitung menggunakan biaya pembelian pertama. Berikut ilustrasi perhitungannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Perhitungan Penilaian Persediaan dengan Metode MTKP/LIFO dan
Sistem Pencatatan Perpetual

Tanggal		Pembelian			Beban Pokok Penjualan			Persediaan		
		Q	Biaya per Unit	Jumlah Biaya	Q	Biaya per Unit	Jumlah Biaya	Q	Biaya per Unit	Jumlah Biaya
Mar	1							10	100.000	1.000.000
	4				7	100.000	700.000	3	100.000	300.000

	10							3	100.000	300.000
		8	105.000	840.000				8	105.000	840.000
	22				4	105.000	420.000	3	100.000	300.000
								4	105.000	420.000
	28				2	105.000	210.000	3	100.000	300.000
								2	105.000	210.000
	30	10	110.000	1.100.000				3	100.000	300.000
								2	105.000	210.000
								10	110.000	1.100.000

Sumber: Sasongko, dkk., (2018: 314)

Pada metode rata-rata tertimbang perhitungan beban pokok penjualan menggunakan rata-rata biaya per unit dari setiap kali terjadi pembelian, yaitu total biaya persediaan akhir ditambah total biaya pembelian dibagi jumlah persediaan yang ada.. Berikut ilustrasi perhitungannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Perhitungan Penilaian Persediaan dengan Metode Rata-rata Tertimbang dan Sistem Pencatatan Perpetual

Tanggal	Pembelian			Beban Pokok Penjualan			Persediaan		
	Q	Biaya per Unit	Jumlah Biaya	Q	Biaya per Unit	Jumlah Biaya	Q	Biaya per Unit	Jumlah Biaya
Mar	1						10	100.000	1.000.000
	4			7	100.000	700.000	3	100.000	300.000
	10	8	105.000	840.000			11	103.636	1.140.000
	22			4	103.636	414.545	7	103.636	725.455
	28			2	103.636	207.272	5	103.636	518.180
	30	10	110.000	1.100.000			15	107.879	1.618.180

Sumber: Sasongko, dkk., (2018: 318)

Berdasarkan perhitungan diatas, perbedaan di antara ketiga metode tersebut terletak pada beban pokok penjualan. Metode MTKP/LIFO mencatat beban pokok penjualan tertinggi sedangkan metode MPKP/FIFO mencatat beban pokok penjualan yang terendah. Apabila harga pembelian terus meningkat selama satu

periode maka metode MTKP/LIFO akan mencatat beban pokok penjualan yang tertinggi dan metode MPKP/FIFO akan mencatat nilai persediaan akhir yang tertinggi.

2.7.2 Perbandingan Metode Penilaian Persediaan MPKP, MTKP, dan Rata – rata Tertimbang dengan Sistem Pencatatan Periodik

Pada metode MPKP/FIFO biaya dari persediaan yang pertama kali dibeli akan menjadi beban pokok penjualan dari persediaan yang pertama kali dijual. Biaya unit persediaan akhir berasal dari pembelian terakhir yang dilakukan oleh perusahaan. Pada metode MTKP/LIFO biaya dari persediaan yang terakhir kali dibeli akan menjadi beban pokok penjualan dari persediaan yang pertama kali dijual. Biaya unit persediaan akhir berasal dari pembelian awal periode atau dari persediaan awal yang dilakukan oleh perusahaan. Dengan metode rata-rata tertimbang, perhitungan beban pokok penjualan dan nilai persediaan akhir untuk suatu periode diperoleh setelah melakukan perhitungan biaya rata-rata per unit.

Hasil perhitungan yang diperoleh dengan metode pencatatan periodik konsisten dengan metode pencatatan perpetual dengan beban pokok penjualan tertinggi dicatatkan dengan metode MTKP/LIFO, sedangkan metode MPKP/FIFO mencatatkan beban pokok penjualan terendah dan mencatat nilai persediaan akhir tertinggi.

2.8 Pengaruh Metode Penilaian Persediaan

Perusahaan bebas untuk memilih salah satu metode penilaian persediaan tergantung pada kebijakan perusahaan dalam mengambil keputusan. Setiap metode penilaian persediaan akan menghasilkan nilai beban pokok penjualan dan persediaan akhir yang berbeda-beda pada laporan keuangan, dan perlu diketahui juga pengaruh dari setiap metode yang digunakan yaitu :

1. Pengaruh terhadap Laporan Keuangan

Pada Metode MPKP/FIFO (Masuk Pertama Keluar Pertama / *First In First Out*), nilai persediaan yang ditetapkan pada Laporan Posisi Keuangan akan mendekati saat itu. Berbeda halnya dengan Metode MTKP/LIFO (Masuk Terakhir Keluar Pertama / *Last In First Out*), nilai

persediaan pada tanggal laporan posisi keuangan didasarkan pada harga perolehan barang yang dibeli lebih awal. Akibatnya, harga perolehan persediaan tidak mencerminkan keadaan pada tanggal laporan posisi keuangan dan aset lancar sehingga total aset akan dilaporkan lebih rendah dari harga yang berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan.

Pada laporan laba rugi, metode MPKP/FIFO akan menghasilkan laba bersih yang lebih tinggi dibandingkan metode MTKP/LIFO dikarenakan jumlah beban pokok penjualan metode MPKP/FIFO lebih rendah dibandingkan metode MTKP/LIFO.

2. Pengaruh terhadap pajak

Perhitungan laba bersih dengan Metode MTKP/LIFO akan menghasilkan pajak penghasilan yang lebih rendah bila dibandingkan dengan Metode MPKP/FIFO maupun metode rata-rata. Hal tersebut disebabkan karena pada penggunaan Metode MTKP/LIFO laba yang dihasilkan lebih kecil dibandingkan Metode MPKP/FIFO.

2.9 Akibat Kesalahan Pencatatan Persediaan

Kesalahan dalam mencatat jumlah persediaan barang dagang akan mempengaruhi laporan keuangan. Kesalahan yang terjadi mungkin hanya berpengaruh pada periode yang bersangkutan atau mungkin mempengaruhi juga pada periode yang bersangkutan atau mungkin mempengaruhi juga pada periode berikutnya, sehingga diperlukan analisis kesalahan yang terjadi. Menurut Warren, dkk., (2014: 360) Berikut beberapa kesalahan yang dapat terjadi:

- a. Persediaan fisik yang ada di tangan salah hitung.
- b. Biaya-biaya dialokasikan tidak benar kedalam persediaan. Contoh : Metode FIFO, LIFO, atau Rata-rata tertimbang tidak diaplikasikan secara benar.
- c. Persediaan yang ada di pengiriman dimasukkan atau tidak secara benar dari persediaan.
- d. Persediaan konsiyasi termasuk atau tidak secara benar dari persediaan.

Pada Laporan Posisi Keuangan, kesalahan persediaan menyebabkan salah saji nilai persediaan barang dagang, total aset lancar, total aset dan ekuitas

pemilik. Pengaruh dari kesalahan pada Laporan Posisi Keuangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7
Pengaruh Kesalahan pada Persediaan terhadap Laporan Posisi Keuangan

Persediaan Akhir	Pengaruh pada Laporan Posisi Keuangan			
	Persediaan Dagang	Aset Lancar	Total Aset	Ekuitas Pemilik (Modal)
Dilaporkan terlalu rendah	Terlalu rendah	Terlalu tinggi	Terlalu tinggi	Terlalu rendah
Dilaporkan terlalu tinggi	Terlalu tinggi	Terlalu rendah	Terlalu rendah	Terlalu tinggi

Sumber : Warren, dkk., (2014: 362)

Kesalahan pada persediaan akan mengakibatkan salah saji jumlah beban pokok penjualan, laba kotor, dan laba bersih pada Laporan Laba Rugi. Pengaruh dari kesalahan pada Laporan Laba Rugi periode berjalan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.8
Pengaruh Kesalahan pada Persediaan terhadap Laporan Laba Rugi

Kesalahan pada Persediaan	Pengaruh Laporan Laba Rugi		
	Beban Pokok Penjualan	Laba Kotor	Laba Bersih
Persediaan Awal:			
Dilaporkan terlalu rendah	Terlalu rendah	Terlalu tinggi	Terlalu tinggi
Dilaporkan terlalu tinggi	Terlalu tinggi	Terlalu rendah	Terlalu rendah
Persediaan Akhir:			
Dilaporkan terlalu rendah	Terlalu tinggi	Terlalu rendah	Terlalu rendah
Dilaporkan terlalu tinggi	Understated	Terlalu tinggi	Terlalu tinggi

Sumber : Warren, dkk., (2014: 361)